



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOYCKE GARDA ARIA**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT**
3. NHK : **519632**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 6.268.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
4. Tanah Seluas 25000 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, LAINNYA Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 438.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 642.000.000**

1. MOBIL, NISSAN SERENA MINI Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. LAINNYA, POLYGON XC COLOSUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
7. MOBIL, NISSAN ELGRAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000
8. MOBIL, NISAN ELGRAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	515.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.535.500.000
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.335.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.